



TAHUN 2022



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2015-2019.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta bermanfaat bagi seluruh aparat Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Probolinggo.

Demikian LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo ini disusun, agar dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan. Menyadari keterbatasan yang ada, maka kami sampaikan permohonan maaf atas kesalahan atau kekurangtepatan yang terjadi dan dengan segenap kerendahan hati kami mengharap dukungan kritik dan saran demi pembenahan/perbaikan-perbaikan, sehingga seiring

pergantian waktu pada penyusunan mendatang dapatnya lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Probolinggo, Januari 2023

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo



REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19670711 198809 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2.. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	15
2.2. Program dan Kegiatan	16
2.3. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	44
4.2. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kinerja	44
LAMPIRAN	
1. Matriks Renstra	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
3. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	
4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	
5. Data Pendukung Capaian Kinerja Perangkat Daerah	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2022
- Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2022
- Tabel 3.1.1.A. Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- Tabel 3.1.1.B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022;
- Tabel 3.1.1.C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- Tabel 3.1.1.D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- Tabel 3.1.1.E. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
- Tabel 3.1.1.F. Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- Tabel 3.1.1.G. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- Tabel 3.1.1.H. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- Tabel 3.1.1.I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.
- Tabel 3.1.2.A. Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- Tabel 3.1.2.B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022;
- Tabel 3.1.2.C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- Tabel 3.1.2.D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- Tabel 3.1.2.E. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;

- Tabel 3.1.2.F. Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- Tabel 3.1.1.G. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- Tabel 3.1.2.H. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- Tabel 3.1.2.I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.
- Tabel 3.1.3.A. Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- Tabel 3.1.3.B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022;
- Tabel 3.1.3.C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- Tabel 3.1.3.D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- Tabel 3.1.3.E. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
- Tabel 3.1.3.F. Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- Tabel 3.1.3.G. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- Tabel 3.1.3.H. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- Tabel 3.1.3.I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.
- Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada Tahun 2022 dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022 dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta bermanfaat bagi seluruh aparat Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Probolinggo.

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran terhadap target yang tercantum pada Indikator Kinerja Utama rata-rata sudah pada pencapaian diatas 90 %. Pelaksanaan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan total anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp 10.180.573.349,- yang dilaksanakan melalui 13 (Tiga Belas) Program dan 26 (Dua Puluh Enam) Kegiatan serta 62 (Enam Puluh Dua) Sub Kegiatan. Realisasi capaian anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat tersebut pada Tahun 2022 adalah Rp 8.992.776.611,- dengan rata-rata prosentase capaian anggaran program sebesar 88.33 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.1.1 Sejarah Organisasi

Dinas Sosial berdiri pertama kali pada Tahun 1971 pada waktu itu Gedung Dinas Sosial berada di Jalan Anggrek No.15 di bawah naungan Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu Cabang I Dinas Sosial Kota Probolinggo.

Pada Tahun 2000 Dinas Sosial di serahkan ke Daerah karena adanya Otonomi Daerah. Pada Tahun 2005 Dinas Sosial di gabung dengan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo yang terletak di Jalan Raya Dringu No.13 Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Dinas Sosial Kota Probolinggo merupakan lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang pelayanan Masyarakat yaitu melayani masyarakat terutama masyarakat yang mengalami Permasalahan Sosial. Namun Pada Tahun 2020, Dinas Sosial merger dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi pada tahun ini sudah menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang mengampu tiga urusan sekaligus. Urusan tersebut antara lain Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf untuk menjalankan aktifitasnya. Dalam kurun waktu 47 Tahun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo telah mengalami pergantian Kepala Dinas Sebanyak 12 kali, yaitu :

- Tahun 1971 – 1986 dipimpin oleh Bapak Soewarso, Bc.HK.
- Tahun 1986 – 1994 dipimpin oleh Bapak Drs. Sukarlan S
- Tahun 1994 – 1998 dipimpin oleh Bapak Drs. Nursidiq
- Tahun 1998 – 2005 dipimpin oleh Bapak Drs. Showan Tohari
- Tahun 2005 – 2010 dipimpin oleh Bapak Edy Sutrisno, SH, M.Si.
- Tahun 2010 – 2011 dipimpin oleh Bapak Drs.Maksum S, SH, M.Mpd.
- Tahun 2011 – 2012 dipimpin oleh Bapak Drs. Muljono.
- Tahun 2012 – 2013 dipimpin oleh Bapak Soemantri, S.Sos.
- Tahun 2013 dipimpin oleh Bapak Edy Sutrisno, SH, M.Si.
- Tahun 2013 – 2015 dipimpin oleh Bapak Drs. Sukam, M.Si.
- Tahun 2015 – 2017 dipimpin oleh Bapak Moch. Maskur, M. Pd.
- Tahun 2017 – 2020 dipimpin oleh Bapak Drs. Zainullah, MM.
- Tahun 2020 – 2021 dipimpin oleh Ibu Rachma Nurcahyarini, S.Sos., M.Si.
- Tahun 2020 – Sekarang dipimpin oleh Bapak Rey Suwigtyo, S.Sos., M.Si.

Selama 47 tahun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, baik dalam kuantitas pelayanan, sarana dan prasarana maupun kualitas karyawan. Hal itu akan menambah kepercayaan masyarakat untuk selalu berhubungan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tingginya minat masyarakat memberikan dampak meningkatnya kualitas input masyarakat dari tahun ke tahun. Dengan tingginya input yang didapat, hal ini merupakan tantangan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Walikota Probolinggo

Nomor 10 Tahun 2022 Tanggal 03 Februari 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebagai berikut:

- A. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- i. perumusan kebijakan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - ii. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - iii. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - iv. pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - v. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- B. Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
- i. Kepala Dinas;
 - ii. Sekretariat, terdiri atas :
 - a) subbagian tata usaha; dan
 - b) kelompok jabatan fungsional.
 - iii. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - iv. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - v. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - vi. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - vii. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

C. Sekretariat

- i. Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan program kerja dan keuangan, menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan dan mempunyai fungsi:
 - a) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - b) pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan dan kearsipan;
 - c) pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - d) pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
 - e) pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
 - f) pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - g) pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
 - h) pelaksanaan pengelolaan keuangan keuangan Dinas;
 - i) pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah pada Dinas;
 - j) pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas;
 - k) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan
 - l) pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ii. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- b) menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan subbagian tata usaha;
- a) menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada subbagian tata usaha;
- b) membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- c) melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan tata kearsipan;
- d) melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
- e) mengkoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
- f) melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
- g) menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- h) melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kerja;
- i) melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;
- j) melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- k) melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan subbagian tata usaha;

- l) menyusun laporan pelaksanaan;

D. Bidang Rehabilitasi, Pelindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai fungsi :

- i. perumusan rencana kerja di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- ii. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- iii. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- iv. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial; dan

- v. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yang meliputi penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai fungsi :

- i. perumusan rencana kerja di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yang meliputi penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
- ii. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yang meliputi penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
- iii. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yang meliputi penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial;
- iv. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yang meliputi penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan

kapasitas, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial; dan

- v. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender.

Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai fungsi :

- i. perumusan rencana kerja di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
- ii. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
- iii. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
- iv. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan serta pengarusutamaan gender;
- v. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak, mempunyai fungsi :

- i. perumusan rencana kerja di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
- ii. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
- iii. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
- iv. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak yang meliputi perlindungan perempuan dan anak, dan pengarusutamaan hak anak;
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

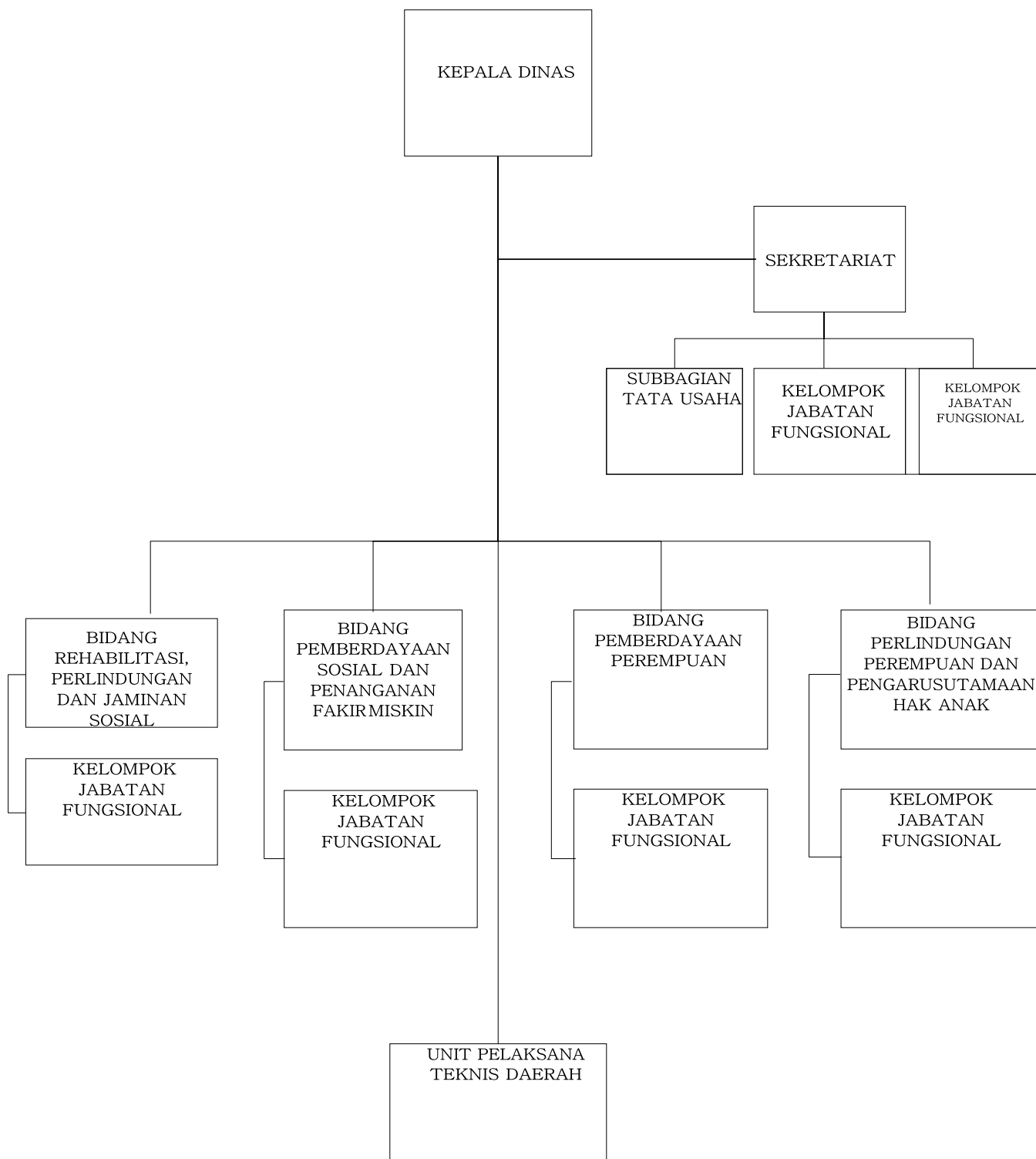
H. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi :

- i. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
- ii. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Bagan Struktur Organisasi

Bagan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kota Probolinggo



1.1.3 Sumber Daya Organisasi

Jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo per 31 Desember pada Tahun 2022 terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) pegawai terdiri dari:

- a. 5 (Lima) orang pejabat struktural;
- b. 1 (satu) orang pejabat fungsional perencana ahli muda;
- c. 1 (satu) orang pejabat fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda;
- d. 4 (empat) orang pejabat fungsional pekerja sosial ahli pertama;
- e. 2 (dua) orang pejabat fungsional analis kebijakan ahli muda;
- f. 5 (lima) orang pejabat fungsional pekerja sosial ahli muda;
- g. 1 (satu) orang pejabat fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda;
- h. 1 (satu) orang pejabat fungsional Arsiparis Terampil;
- i. dan 18 (delapan belas) orang staf.

1.1.4 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- c. Permenpan-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

- Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- e. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi

Pada Tahun 2022 terjadi inflasi di seluruh Indonesia yang diakibatkan oleh tiga faktor. Pertama reported inflation yang dipicu oleh gangguan rantai pasok komoditas pangan dan energi karena kondisi global dan geopolitik Rusia-Ukraina. Lalu faktor musiman dan penyesuaian harga. Dari ketiga faktor yang ada, yang paling mempengaruhi adalah rantai pasok energi karena kondisi global dan geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan BBM di Indonesia pada umumnya. Sesuai dengan himbauan dari pemerintah pusat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo salah satu dari perangkat daerah yang harus ikut serta dalam penanganan dampak inflasi terhadap PMKS yang ada di Kota Probolinggo.

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Probolinggo yang ditandai dengan relative tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Probolinggo dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Beberapa hal yang cukup menonjol antara lain :

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar anak terlantar, keluarga miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat;

- b. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar anak, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, penyandang disabilitas, pengemis, dan gelandangan;
- c. Masih tingginya kasus terhadap anak dan perempuan dengan terdapat 43 Kasus yang mengadu pada P2TP2A pada tahun ini. Meskipun mengalami penurunan dari kasus pada tahun 2021 yaitu terdapat 47 Kasus.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah :

1. Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat;
2. Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender.

Mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta Meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah :

1. Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan;
3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak;

2.2 Program dan Kegiatan

Program, Kegiatan, Anggaran, dan Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2022, dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.
Program dan Kegiatan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo Tahun 2022

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%
URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAN BIDANG SOSIAL	8.861.658.449	8.071.418.807	91,08%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.221.223.559	5.917.643.512	95,12%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.592.000	56.218.983	99,34%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.375.000	9.224.000	98,39%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.217.000	46.994.983	99,53%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.110.943.866	4.850.012.104	94,89%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.977.991.716	4.724.202.484	94,90%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91.332.000	84.204.000	92,20%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41.620.150	41.605.620	99,97%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.560.000	5.560.000	100,00%

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.560.000	5.560.000	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	197.772.320	195.896.618	99,05%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.100.000	34.937.320	99,54%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	162.672.320	160.959.298	98,95%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.726.598	356.016.002	99,52%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.170.680	28.048.700	99,57%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.527.000	5.526.500	99,99%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.395.300	7.379.000	99,78%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.078.000	3.040.000	98,77%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	4.492.000	99,82%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.055.618	265.578.303	99,45%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	42.000.000	41.951.499	99,88%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.727.500	66.703.500	99,96%
Pengadaan Mebel	13.427.500	13.403.500	99,82%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.300.000	53.300.000	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.872.100	125.841.859	77,26%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.150.000	1.136.500	98,83%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.509.700	96.115.359	87,77%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.137.500	10.020.000	36,92%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.074.900	18.570.000	74,06%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	263.029.175	261.394.446	99,38%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.346.000	26.882.789	98,31%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	120.732.175	119.671.148	99,12%

Lapangan			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.000.000	47.940.000	99,88%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.951.000	66.900.509	99,92%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	92.796.900	90.497.220	97,52%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	92.796.900	90.497.220	97,52%
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90.857.000	88.623.720	97,54%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1.939.900	1.873.500	96,58%
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.069.043.500	958.810.121	89,69%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	859.963.000	800.382.320	93,07%
Penyediaan Permakanan	794.088.000	749.557.320	94,39%
Penyediaan Alat Bantu	65.875.000	50.825.000	77,15%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	209.080.500	158.427.801	75,77%
Penyediaan Permakanan	9.175.000	7.580.000	82,62%
Penyediaan Sandang	199.905.500	150.847.801	75,46%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.233.991.500	883.642.634	71,61%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.233.991.500	883.642.634	71,61%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	409.413.900	370.462.304	90,49%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	638.349.600	354.242.520	55,49%
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	186.228.000	158.937.810	85,35%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	142.976.190	120.534.300	84,30%

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	142.976.190	120.534.300	84,30%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	142.976.190	120.534.300	84,30%
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	101.626.800	100.291.020	98,69%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	101.626.800	100.291.020	98,69%
Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10.750.000	10.750.000	100,00%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.014.600	14.000.000	99,90%
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	76.862.200	75.541.020	98,28%
URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	450.027.400	442.115.284	98,24%
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	58.700.000	56.257.800	95,84%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	40.320.000	38.769.800	96,16%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	18.380.000	17.488.000	95,15%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	391.327.400	385.857.484	98,60%
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	158.954.000	158.028.184	99,42%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	232.373.400	227.829.300	98,04%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	3.500.000	2.500.000	71,43%

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	3.500.000	2.500.000	71,43%
Penyediaan Data <u>Gender</u> dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	2.500.000	2.500.000	100,00%
Penyajian dan Pemanfaatan Data <u>Gender</u> dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000	-	0,00%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	272.614.800	148.156.600	54,35%
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	55.725.000	45.279.000	81,25%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	51.500.000	41.698.000	80,97%
Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	4.225.000	3.581.000	84,76%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	180.040.000	75.227.600	41,78%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	64.450.000	57.250.000	88,83%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.590.000	17.977.600	15,55%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.849.800	27.650.000	75,03%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.199.800	11.550.000	57,18%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	16.650.000	16.100.000	96,70%

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	344.635.000	132.944.500	38,58%
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	92.125.000	75.475.000	81,93%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.675.000	22.575.000	73,59%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	61.450.000	52.900.000	86,09%
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	175.704.000	15.169.500	8,63%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	164.529.000	15.169.500	9,22%
Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	6.950.000	-	0,00%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah Kab/Kota	4.225.000	-	0,00%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	76.806.000	42.300.000	55,07%
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	76.806.000	42.300.000	55,07%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	244.937.700	192.469.420	78,58%
Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	60.149.900	59.977.900	99,71%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	7.499.900	7.387.400	98,50%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	52.650.000	52.590.500	99,89%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	184.787.800	132.491.520	71,70%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	100.550.000	60.988.000	60,65%
Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	17.000.000	13.980.000	82,24%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	67.237.800	57.523.520	85,55%
URUSAN PEMERINTAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.200.000	3.172.000	99,13%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000	3.172.000	99,13%
Fasilitasi Bulahan Bakti Gotong Royong Masyarakat	3.200.000	3.172.000	99,13%
TOTAL JUMLAH	10.180.573.349	8.992.776.611	88,33%

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan cita-cita jangka menengah Kota Probolinggo, maka disusunlah Perjanjian Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022, Perjanjian Kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo Tahun 2021



**PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **REY SUWIGTYO, S.Sos. M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP**
Jabatan : Wali Kota Probolinggo
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, November 2022
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP


REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	88 %
2.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Nilai Evaluasi Pengarusutamaan Gender	Utama
3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	- Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani - Kategori Kota Layak Anak	100 % Nindya

Program (5)	Anggaran (Rp) (6)	Keterangan (7)
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.221.223.559,-	DAU
- Program Pemberdayaan Sosial	92.796.900,-	DAU
- Rehabilitas Sosial	1.069.043.500,-	DAU
- Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.233.991.500,-	DAU/DBH-CHT
- Penanganan Bencana	142.976.190,-	DAU
- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	101.626.800,-	DAU
- Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	450.027.400,-	DAU/DID
- Perlindungan Perempuan	272.614.800,-	DAU/DAK
- Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	3.500.000,-	DAU
- Pemenuhan Hak Anak (PHA)	244.937.700,-	DAU

- Perlindungan Khusus Hak Anak	344.635.000,-	DAU/DAK
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.200.000,-	DAU
Jumlah	Rp. 10.180.573.349,-	

WALIKOTA,

HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HPProbolinggo, November 2022
KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA
KOTA PROBOLINGGOREY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja harus melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Oleh karena itu, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut:

No.	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Lebih dari 89%	Sangat Baik
2.	60% hingga 80%	Baik
3.	40% hingga 60%	Cukup
4.	20% hingga 40%	Kurang
5.	Kurang dari 20%	Sangat Kurang

Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Program Tahun 2022 dibandingkan dengan Target, dibandingkan dengan Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Program Tahun 2022, dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2022, dan menganalisa penyebab keberhasilan atau kegagalan,

menganalisa efisiensi penggunaan anggaran serta menganalisa kegiatan program melalui beberapa tabel berikut ini, antara lain :

- a. Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi;
- b. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022;
- c. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan akhir Periode Renstra;
- d. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional;
- e. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan;
- f. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran;
- g. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya;
- h. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan;
- i. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Capaian indikator-indikator kinerja sasaran kegiatan program tahun 2022, bila dibandingkan dengan target, pada umumnya belum tercapai, meskipun ada beberapa indikator yang sudah mencapai sesuai target tahun 2021 atau target akhir tahun Renstra 2015-2019 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Hasil kegiatan program tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, bila ditinjau dari segi tingkat efisiensi anggaran adalah cukup efisien karena rata-rata penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan dalam hal ini capaian realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerjanya artinya dengan penggunaan anggaran yang rata-rata seminimal mungkin hasil capaian indikator kinerja tercapai rata-rata 90%, sehingga bisa dikatakan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dan tingkat efisiensi anggaran yang dicapai tiap-tiap indikator kinerja rata-rata kurang lebih antara 20% sampai dengan 30%.

3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.1.A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	88%	80,90%	92%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Tabel 3.1.1.B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
		Tahun 2021	Tahun 2022
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	87%	69,37%	80,90%

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.1.C.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90%	80,90%	90%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.1.D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
-------------------------	----------------------	--------------------	------------

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80.90%	-	-
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	---

E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.1.E.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2.446.011.190	24,03%

F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.1.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	88%	80,90 %	92%	2.446.011.190	1.962.987.055	80%

G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.1.1.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	92%	80%	87%

- H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.1.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	88%	80,90%	-

- I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.1.I.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	88%	80.90%	<p>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</p> <p>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</p> <p>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</p> <p>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</p> <p>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terdapat Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota</p>

3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.2.A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender		Utama	-	0%

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Tabel 3.1.2.B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
		Tahun 2021	Tahun 2022
Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender	Utama	N/A	-

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.2.C.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender	Mentor	-	-

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.2.D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender	-	-	-

E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.2.E.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender	453.527.400	4,45%

F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.2.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender	Utama	-	-	453.527.400	444.615.284	98%

G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.1.2.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender	-	98%	-

H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.2.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab
Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender	Utama	-	Tidak adanya Penilaian Evaluasi Pengarustamaan Gender pada Kementerian PPPA dikarenakan adanya perubahan indikator penilaian. Akan tetapi dilakukan evaluasi pengarustamaan gender secara mandiri oleh Dinas PPPAK Provinsi Jawa Timur.

I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.2.I.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN
Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender	Utama	-	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.1.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tumbuh Kembang Anak

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.3.A.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
-------------------------	--------	-----------	------------

Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	100%	100%
Kategori Kota Layak	Nindya	Nindya	Nindya

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Tabel 3.1.3.B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	
		Tahun 2021	Tahun 2022
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	90%	N/A	100,0%
Kategori Kota Layak	Nindya	Nindya	Nindya

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir Periode Renstra

Tabel 3.1.3.C.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	100,0%	100%
Kategori Kota Layak	Utama	Nindya	Nindya

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Tabel 3.1.3.D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100,0%	-	-
Kategori Kota Layak	Nindya	-	-

E. Tabel Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.3.E.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	617.249.800	6,06%
Kategori Kota Layak	244.937.700	2,41%

F. Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.1.3.F.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	100,0 %	100%	617.249.800	281.101.100	46%
Kategori Kota Layak	Nindya	Nindya	Nindya	244.937.700	192.469.420	79%

G. Tabel Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.1.G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	46%	46%
Kategori Kota Layak	Nindya	79%	96%

H. Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.1.3.H.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	Analisa Penyebab
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	100,0%	-
Kategori Layak	Nindya	Nindya	-

- I. Tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.3.I.

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100%	100%	<p>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</p> <p>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota</p> <p>Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</p> <p>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>

Kategori Kota Layak			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota
	Nindya	Nindya	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota

3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan total anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp 10.180.573.349,- yang dilaksanakan melalui 13 (Tiga Belas) Program dan 26 (Dua Puluh Enam) Kegiatan serta 62 (Enam Puluh Dua) Sub Kegiatan. Realisasi capaian anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat tersebut pada Tahun 2022 adalah Rp 8.992.776.611,- dengan rata-rata prosentase capaian anggaran program sebesar 88.33 %. Secara rinci, realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran Tahun 2022
Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%
URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAN BIDANG SOSIAL	8.861.658.449	8.071.418.807	91,08%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.221.223.559	5.917.643.512	95,12%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.592.000	56.218.983	99,34%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.375.000	9.224.000	98,39%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.217.000	46.994.983	99,53%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.110.943.866	4.850.012.104	94,89%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.977.991.716	4.724.202.484	94,90%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91.332.000	84.204.000	92,20%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41.620.150	41.605.620	99,97%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.560.000	5.560.000	100,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.560.000	5.560.000	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	197.772.320	195.896.618	99,05%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.100.000	34.937.320	99,54%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	162.672.320	160.959.298	98,95%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.726.598	356.016.002	99,52%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.170.680	28.048.700	99,57%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.527.000	5.526.500	99,99%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.395.300	7.379.000	99,78%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.078.000	3.040.000	98,77%

Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	4.492.000	99,82%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.055.618	265.578.303	99,45%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	42.000.000	41.951.499	99,88%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.727.500	66.703.500	99,96%
Pengadaan Mebel	13.427.500	13.403.500	99,82%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.300.000	53.300.000	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.872.100	125.841.859	77,26%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.150.000	1.136.500	98,83%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.509.700	96.115.359	87,77%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.137.500	10.020.000	36,92%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.074.900	18.570.000	74,06%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	263.029.175	261.394.446	99,38%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.346.000	26.882.789	98,31%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.732.175	119.671.148	99,12%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.000.000	47.940.000	99,88%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.951.000	66.900.509	99,92%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	92.796.900	90.497.220	97,52%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	92.796.900	90.497.220	97,52%
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	90.857.000	88.623.720	97,54%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1.939.900	1.873.500	96,58%

(LK3)			
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.069.043.500	958.810.121	89,69%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	859.963.000	800.382.320	93,07%
Penyediaan Permakanan	794.088.000	749.557.320	94,39%
Penyediaan Alat Bantu	65.875.000	50.825.000	77,15%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	209.080.500	158.427.801	75,77%
Penyediaan Permakanan	9.175.000	7.580.000	82,62%
Penyediaan Sandang	199.905.500	150.847.801	75,46%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.233.991.500	883.642.634	71,61%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.233.991.500	883.642.634	71,61%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	409.413.900	370.462.304	90,49%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	638.349.600	354.242.520	55,49%
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	186.228.000	158.937.810	85,35%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	142.976.190	120.534.300	84,30%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	142.976.190	120.534.300	84,30%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	142.976.190	120.534.300	84,30%
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	101.626.800	100.291.020	98,69%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	101.626.800	100.291.020	98,69%
Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10.750.000	10.750.000	100,00%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.014.600	14.000.000	99,90%
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	76.862.200	75.541.020	98,28%

URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	450.027.400	442.115.284	98,24%
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	58.700.000	56.257.800	95,84%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	40.320.000	38.769.800	96,16%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	18.380.000	17.488.000	95,15%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	391.327.400	385.857.484	98,60%
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	158.954.000	158.028.184	99,42%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	232.373.400	227.829.300	98,04%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	3.500.000	2.500.000	71,43%
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	3.500.000	2.500.000	71,43%
Penyediaan Data <u>Gender</u> dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	2.500.000	2.500.000	100,00%
Penyajian dan Pemanfaatan Data <u>Gender</u> dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000	-	0,00%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	272.614.800	148.156.600	54,35%
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	55.725.000	45.279.000	81,25%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	51.500.000	41.698.000	80,97%

Kabupaten/Kota			
Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	4.225.000	3.581.000	84,76%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	180.040.000	75.227.600	41,78%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	64.450.000	57.250.000	88,83%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.590.000	17.977.600	15,55%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.849.800	27.650.000	75,03%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.199.800	11.550.000	57,18%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.650.000	16.100.000	96,70%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	344.635.000	132.944.500	38,58%
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	92.125.000	75.475.000	81,93%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.675.000	22.575.000	73,59%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	61.450.000	52.900.000	86,09%

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	175.704.000	15.169.500	8,63%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	164.529.000	15.169.500	9,22%
Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	6.950.000	-	0,00%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah Kab/Kota	4.225.000	-	0,00%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	76.806.000	42.300.000	55,07%
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	76.806.000	42.300.000	55,07%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	244.937.700	192.469.420	78,58%
Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	60.149.900	59.977.900	99,71%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	7.499.900	7.387.400	98,50%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	52.650.000	52.590.500	99,89%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	184.787.800	132.491.520	71,70%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	100.550.000	60.988.000	60,65%

Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	17.000.000	13.980.000	82,24%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	67.237.800	57.523.520	85,55%
URUSAN PEMERINTAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.200.000	3.172.000	99,13%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000	3.172.000	99,13%
Fasilitasi Bulahan Bakti Gotong Royong Masyarakat	3.200.000	3.172.000	99,13%
TOTAL JUMLAH	10.180.573.349	8.992.776.611	88,33%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2022 ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo berdasarkan tolak ukur perencanaan strategi tahun 2015-2019.

Pelaksanaan program kegiatan Tahun 2022 oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, menghasilkan capaian kinerja kegiatan program rata-rata 100 % dimana masing-masing indikator sasaran sudah ada yang memenuhi target capaian indikator Tahun 2022. Namun terdapat satu indikator yang tidak ada realisasi yaitu pada indikator “Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender”. Hal tersebut disebabkan tidak ada pelaksanaan Penilaian Evaluasi Pengarustamaan Gender pada tingkat Kementerian PPPA dikarenakan ada perubahan indikator. Dengan realisasi anggaran 2022 sebesar 88.33%, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini anggaran, sangat baik.

4.2. Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang perlu adanya perencanaan kegiatan program yang lebih baik. Selain itu pentingnya mencermati aturan-aturan penganggaran yang ada sebab kebijakan pada tahun 2022 merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 harus menggunakan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dengan Nomenklatur yang berbeda dari tahun sebelumnya dan menyesuaikan dengan indikator kinerja pada setiap sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050 – 5889 Tahun 2021.

Selanjutnya dokumen ini dapat digunakan sebagai bahan pengkajian dan evaluasi, untuk perbaikan secara terus menerus guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dengan perencanaan yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan, sehingga program-program Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat secara bertahap dapat dilaksanakan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Renstra
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022
4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
5. Data Pendukung Capaian Kinerja Perangkat Daerah

1. Matriks Renstra

Matrik Renstra

- Instansi : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
- Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 d. pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : a. Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat
 b. Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender
- Indikator Tujuan : a. Persentase PMKS
 b. Indeks Pemberdayaan Gender

Indikator Kinerja Tujuan	Formulasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PMKS	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p> $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan yi = rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan n jumlah penduduk </p>	31.17	35	34.5	34	33.5	33
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Pengolahan Data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo	67.76	65.92	68.30	68.35	68.40	68.45

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi	Kondisi Awal	Target tahun						Cara mencapai tujuan dan sasaran	
	Uraian			2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Strategi/kebijakan	Program dan kegiatan
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	<p>Jumlah PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah PMKS yang menjadi Target Fasilitasi Tahun N</p>		86%	87%	88%	89%	90%	85%	<p>Strategi : Pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan ketrampilan bagi PMKS</p> <p>Kebijakan: - Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan jaminan sosial - Optimasi pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir Miskin</p>	<p>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial <p>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

												<p>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota <p>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender	Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender		N/A	N/A	N/A	Utama	Utama	Mentor		<p>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

		<p>Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani</p>	<p>Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang selesai ditangani</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada P2TP2A dan Lembaga Terkait Lainnya</p>		100%	100%	100%	100%	100%	100%		<p>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <p>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
--	--	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

												<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota
		Kategori Kota Layak Anak	Level Kota Layak Anak		Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama		<p>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota - - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota -

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **REY SUWIGTYO, S.Sos. M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kota Probolinggo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP**
Jabatan : Wali Kota Probolinggo
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

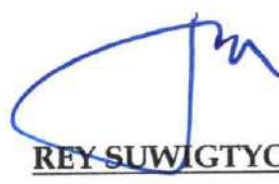
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, Januari 2022
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP


REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	88 %
2	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Nilai Evaluasi Pengarustamaan Gender	Utama
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	- Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani - Kategori Kota Layak Anak	100 % Nindya

Program (5)	Anggaran (Rp) (6)	Keterangan (7)
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.174.815.849,-	DAU
- Program Pemberdayaan Sosial	92.796.900,-	DAU
- Rehabilitas Sosial	1.027.559.900,-	DAU
- Perlindungan dan Jaminan Sosial	723.805.700,-	DAU
- Penanganan Bencana	130.999.790,-	DAU
- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	101.626.800,-	DAU
- Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	290.343.900,-	DAU
- Perlindungan Perempuan	252.584.800,-	DAU/DAK
- Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	3.500.000,-	DAU
- Pemenuhan Hak Anak (PHA)	174.587.700,-	DAU

- Perlindungan Khusus Hak Anak	324.215.000,-	DAU/DAK
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.200.000,-	DAU

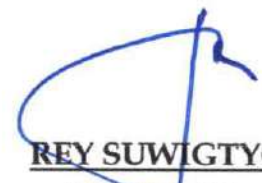
Jumlah

Rp. 9.300.036.339,-

WALIKOTA,


HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

Probolinggo, Januari 2022
KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA
KOTA PROBOLINGGO


REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

3. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022



PENGUKURAN KINERJA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2022



TRIWULAN I



PENGUKURAN KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK NOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2022

TRIMULAN I
Tahun Anggaran 2022

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Anggaran Tahunan	CAPAIAN (%)
								Trwulan I	Trwulan II	Trwulan III	Trwulan IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Presentase PMKS	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Terpenuhi Kebutuhannya	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi target di Tahun N X 100 %	88	%	0%	0%	0%	88%	0%	0%	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
														URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL	8.251.604.938	1.487.266.999	18,14%
														PROGRAM PERUMAH URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.174.815.540	1.314.387.179	21,28%
														Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.887.960	7.825.620	11,68%
														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	625.000	5,50%
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	52.887.960	7.191.620	13,43%
														Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.134.655.000	983.094.387	19,15%
														Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.550.084.000	978.214.357	19,73%
														Pelaksanaan Penerimaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	124.419.000	-	0,00%
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	52.162.000	4.862.620	9,36%
														Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.120.000	-	0,00%
														Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.120.000	-	0,00%
														Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	197.501.800	62.226.411	31,51%
														Pengadaan Pakaian Dinas Berwarna Hitam Kelengkapan	35.100.000	34.937.320	99,54%
														Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	162.401.800	27.289.091	16,80%
														Administrasi Umum Perangkat Daerah	265.848.760	63.973.826	24,08%
														Persediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	27.141.748	6.962.900	25,62%
														Persediaan Perlatan Rumah Tangga	6.648.720	2.195.000	33,01%
														Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.394.300	1.780.000	23,80%
														Pengadaan Bahan Baku dan Penunjang Perundang-undangan	1.958.000	520.000	26,53%
														Facilitas Kunjungan Tamu	3.300.000	1.100.000	33,33%
														Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.365.000	38.802.000	22,72%
														Dibayar Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48.000.000	10.533.826	21,96%
														Pengadaan Barang Milik Daerah Perorangan Urusan Pemerintahan Daerah	78.746.500	60.193.600	76,32%
														Pengadaan Mebel	13.427.500	13.403.500	99,82%
														Pengadaan Perlatan dan Meubel Lainnya	57.319.000	46.790.100	81,47%
														Pengadaan Jasa Perorangan Urusan Pemerintahan Daerah	176.981.900	24.874.847	14,06%
														Pengadaan Jasa Sural Masyarakat	6.749.500	250.000	3,70%
														Pengadaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.020.000	20.624.847	19,09%
														Pengadaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	37.137.500	-	0,00%
														Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.074.500	4.000.000	15,96%
														Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perorangan Urusan Pemerintahan Daerah	255.063.775	112.194.979	43,98%
														Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.357.900	5.715.550	23,48%
														Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.055.175	26.138.920	22,65%

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Pembungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Saluran Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Page	Realisasi Anggaran Triwulan I	CAPAIAN (%)
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Pemeliharaan Fasilitas dan Mesin Lainnya	45.000.000	13.436.000	29,86%
														Pemeliharaan/Fasilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.751.000	56.505.500	97,31%
														PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	82.796.900	4.606.620	4,98%
														Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	82.796.900	4.606.620	4,98%
														Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	90.857.000	4.606.620	5,07%
														Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1.930.900	-	0,00%
														PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.827.598.900	136.523.240	13,29%
														Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Terlantar, Lanjut Usia Tertentu, serta Galangan Penderita di Luar Partisipasi Sosial	836.283.000	126.135.620	13,47%
														Penyediaan Pemakanan	794.086.000	126.135.620	15,86%
														Penyediaan Alat Bantu	142.175.000	-	0,00%
														Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Partisipasi Sosial	91.296.900	10.384.620	11,37%
														Penyediaan Pemakanan	9.175.000	-	0,00%
														Penyediaan Sendang	82.121.900	10.384.620	12,65%
														PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	723.806.700	34.492.349	4,77%
														Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	723.806.700	34.492.349	4,77%
														Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	409.413.500	10.330.109	2,52%
														Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	189.347.800	19.660.620	10,39%
														Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	125.044.000	4.501.620	3,60%
														PROGRAM PEMBANGUNAN BENCANA	138.996.790	-	0,00%
														Penyelenggaraan Pembudayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	138.996.790	-	0,00%
														Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tesuna Segi Bencana	130.996.790	-	0,00%
														PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAULAWAY	191.626.800	7.190.620	7,08%
														Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	191.626.800	7.190.620	7,08%
														Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10.750.000	-	0,00%
														Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	17.499.600	430.000	2,46%
														Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	73.377.200	6.760.620	9,21%
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Keetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Nilai Evaluasi Pengarusutamaan Gender	Nilai Evaluasi Pengarusutamaan Gender	Utama	Utama	-	-	-	Utama	-	-	URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
														URUSAN PEMERINTAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
														PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	290.343.900	91.467.020	31,50%
														Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kecamatan Kabupaten/Kota	58.700.000	350.000	0,60%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kecamatan Kabupaten/Kota	40.320.000	300.000	0,87%
														Aktivasi Kebijakan dan Pendorong Pelaksanaan PUG termasuk PUGG	18.390.000	-	0,00%

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Sasaran Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ragu	Realisasi Anggaran Triwulan I	CAPAIAN (%)
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kesejahteraan Perempuan Kabupaten/Kota	221.643.900	95.117.020	30,33%
														Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	56.954.000	25.600.520	43,42%
														Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	172.689.900	65.516.500	37,94%
														PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	3.586.000	-	0,00%
														Pengumpulan, Pengolahan Analisa dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000	-	0,00%
														Penyediaan Data Gender dan Anak di Kecamatan Kabupaten/Kota	2.500.000	-	0,00%
														Penyediaan dan Penertiban Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kecamatan Kabupaten/Kota	1.000.000	-	0,00%
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Tumbuh Kembang Anak		Pembantaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang selesai ditangani X 100 %	100	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	252.584.800	4.700.000	1,88%
														Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	55.725.000	-	0,00%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	51.500.000	-	0,00%
														Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kecamatan Kabupaten Kota	4.225.000	-	0,00%
														Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kecamatan Kabupaten/Kota	139.590.000	4.700.000	3,37%
														Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kecamatan Kabupaten/Kota	24.000.000	4.000.000	16,67%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kecamatan Kabupaten/Kota	115.590.000	700.000	0,61%
														Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.269.800	-	0,00%
														Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peringatan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kecamatan Kabupaten/Kota	40.619.800	-	0,00%
														Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kecamatan Kabupaten/Kota	16.660.000	-	0,00%
														PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	324.215.000	-	0,00%
														Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	92.125.000	-	0,00%
														Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kecamatan Kabupaten/Kota	30.675.000	-	0,00%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kecamatan Kabupaten/Kota	61.450.000	-	0,00%
														Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	175.704.000	-	0,00%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kecamatan Kabupaten/Kota	164.520.000	-	0,00%

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Pembagian Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Sasaran indikator kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Anggaran Triwulan I	CAPAIAN (%)
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5.950.000	-	0,00%
														Pengujian Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah Kab/Kota	4.225.000	-	0,00%
														Penggiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Kota	58.388.000	-	0,00%
														Ekoordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	55.395.000	-	0,00%
				Kategori Kota Layak Anak	Level Kota Layak Anak	Midyia	Midyia	-	-	-	Midyia	-	-	PROGRAM PEMBERHAM HAK ANAK (PIHA)	174.587.708	20.923.620	14,85%
														Pelaksanaan PIA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	60.148.900	16.193.000	25,77%
														Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	7.490.900	2.762.500	50,17%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	52.665.000	12.340.900	23,44%
														Penggiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	114.437.800	9.820.620	8,58%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	35.200.000	7.175.000	23,78%
														Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	17.900.000	-	0,00%
														Pengujian Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	67.237.800	2.645.620	3,93%
														URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
														PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.200.000	-	0,00%
														Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergesek di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Petakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000	-	0,00%
														Fasilitas Bulatan Baki Golong Rayong Masyarakat	3.200.000	-	0,00%

Probolinggo, April 2022
 DAH PERENCANAAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

 REP. DWIGTYO, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19870711 198803 1 001

Catatan:
 1. Kolom 6 berisi tentang formula perhitungan indikator kinerja (R0/PD)
 2. Kolom 7,9,10,11,12 adalah target indikator tanpa satuan indikator



TRIWULAN II



PENGUKURAN KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2022

TRIMULAH II
Tahun Anggaran 2022

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama PD	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Page	Realisasi Anggaran Triliun Rp	CAPAIAN (%)
								Trisulan I	Trisulan II	Trisulan III	Trisulan IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Terpenuhi Kebutuhannya	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi target di Tahun N ----- X 100 %	88	%	0%	0%	0%	88%	88%	87%	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
														URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL	3.291.864.839	3.982.838.345	43,54%
														PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.174.815.845	2.867.608.684	46,44%
														Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.867.968	18.518.690	27,28%
														Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	825.000	5,50%
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	52.867.968	17.693.690	33,45%
														Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.134.865.868	2.347.641.298	45,72%
														Penyediaan Daji dan Tunjangan ASN	4.968.004.006	2.210.344.848	44,60%
														Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	124.419.000	19.303.000	15,51%
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52.162.000	17.563.460	34,50%
														Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.120.000	-	0,00%
														Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	6.120.000	-	0,00%
														Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	187.501.868	102.842.379	54,97%
														Pengadaan Pakaian Dinas Berseleksi Attribut Kelengkapan	35.100.000	34.937.320	99,54%
														Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	162.401.868	67.905.059	41,81%
														Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.646.768	120.292.114	45,29%
														Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	27.141.748	17.723.790	65,30%
														Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	6.649.720	4.380.590	65,87%
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.395.300	3.855.090	51,48%
														Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	1.506.000	1.600.000	80,06%
														Facilitas Kunjungan Tamu	3.300.000	1.100.000	33,33%
														Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.366.000	70.375.053	41,07%
														Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	49.000.000	21.188.861	44,08%
														Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.746.900	60.163.508	84,96%
														Pengadaan Mebel	13.427.500	13.403.500	99,82%
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.319.000	46.760.000	81,47%
														Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.981.868	87.386.154	32,41%
														Penyediaan Jasa Sural Menjual	6.749.500	500.000	7,41%
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.020.000	45.089.154	41,71%
														Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	37.137.500	1.360.000	3,50%
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.074.800	10.500.000	41,87%
														Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.083.775	160.852.199	56,66%
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.287.600	10.438.856	42,86%
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.935.175	59.682.648	51,03%
														Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	23.829.000	52,99%

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sesman Strategis	Indikator Kinerja Utama PD	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Saluran Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Regulasi/Sub Kegiatan	Page	Realisasi Anggaran Triwulan I	CAPAIAN (%)
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.751.000	66.900.500	97,31%
														PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	92.796.900	27.945.050	30,11%
														Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	92.796.900	27.940.000	30,11%
														Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	90.857.000	27.645.000	30,43%
														Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1.939.900	300.000	15,46%
														PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.827.589.900	389.036.024	21,30%
														Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlestar, Anak Terlestar, Lanjut Usia Terlestar, serta Galangan Penderita di Luar Partisipasi Sosial	936.263.000	369.900.150	39,51%
														Penyediaan Pemakaman	794.086.000	324.675.150	40,89%
														Penyediaan Alat Bantu	142.176.000	45.225.000	31,81%
														Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napsa di Luar Partisipasi Sosial	91.296.900	19.135.874	20,98%
														Penyediaan Pemakaman	9.175.000	2.000.000	21,80%
														Penyediaan Sandang	92.121.900	17.136.674	18,71%
														PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	723.805.700	268.260.527	37,06%
														Pengelolaan Data Faktur Melekin Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota	723.805.700	268.260.527	37,06%
														Pengelolaan Data Faktur Melekin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	409.413.900	103.881.537	25,37%
														Facilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	189.347.800	73.965.450	39,06%
														Facilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	125.044.000	60.423.140	48,31%
														PROGRAM PENANGANAN BENCANA	130.999.790	10.340.900	7,89%
														Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiaptetapan Bencana Kabupaten/Kota	130.999.790	10.340.900	7,89%
														Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Terpadu Tiga Bencana	130.999.790	10.340.000	7,89%
														PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	101.626.800	29.646.050	29,17%
														Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	101.626.800	29.646.050	29,17%
														Rehabilitasi Sarana Dan Peralatan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10.750.000	10.750.000	100,00%
														Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	17.489.500	1.716.000	9,81%
														Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	73.377.200	17.180.050	23,41%
2	Meningkatnya Keterbacaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Nilai Evaluasi Pengarutan Gender	Nilai Evaluasi Pengarusutamaan Gender	Utama	Utama	-	-	-	Utama	-	-	URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
														URUSAN PEMERINTAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
														PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	290.543.900	113.977.434	39,26%
														Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kecamatan Kabupaten/Kota	98.700.000	2.950.000	2,98%
														Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan PUG Kecamatan Kabupaten/Kota	40.320.000	2.950.000	7,32%
														Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Kecamatan PUSC	18.380.000	-	0,00%
														Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	231.643.900	111.027.434	47,93%
														Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	58.954.000	20.979.634	35,59%

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sesuai Strategi	Indikator Kinerja Utama PD	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Page	Realisasi Anggaran Triwulan II	CAPAIAN (%)
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan P2SL, Hak-hak, Sosial dan Ekonomi	172.589.900	60.047.800	46,35%
														PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.500.000	2.500.000	71,43%
														Pengumpulan, Pengolahan Analisa dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000	2.500.000	71,43%
														Penyediaan Data Gender dan Anak di Kecamatan Kabupaten/Kota	2.500.000	2.500.000	100,00%
														Penyajian dan Penambatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kecamatan Kabupaten/Kota	1.000.000	-	0,00%
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Tumbuh Kembang Anak		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang selesai ditangani Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada PZTP2A X 100 %	100	%	0%	3%	0%	100%	0%	0%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	352.584.900	13.225.000	3,24%
														Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.725.000	-	0,00%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	51.500.000	-	0,00%
														Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kecamatan Kabupaten Kota	4.225.000	-	0,00%
														Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kecamatan Kabupaten/Kota	139.598.900	13.225.000	9,47%
														Penyediaan Layanan Pengalihan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kecamatan Kabupaten/Kota	24.000.000	10.000.000	41,67%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kecamatan Kabupaten/Kota	115.590.000	3.225.000	2,79%
														Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.269.800	-	0,00%
														Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perempuan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kecamatan Kabupaten/Kota	40.619.800	-	0,00%
														Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kecamatan Kabupaten/Kota	15.550.000	-	0,00%
														PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	324.215.000	-	0,00%
														Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	92.125.000	-	0,00%
														Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kecamatan Kabupaten/Kota	30.675.000	-	0,00%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kecamatan Kabupaten/Kota	51.450.000	-	0,00%
														Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	175.704.900	-	0,00%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kecamatan Kabupaten/Kota	154.520.000	-	0,00%
														Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kecamatan Kabupaten/Kota	6.950.800	-	0,00%
														Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kecamatan Daerah Kab/Kota	4.225.000	-	0,00%

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Strategi	Indikator Kinerja Utama PD	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun	Sesuai Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Anggaran Triwulan II	CAPAIAN (%)
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Menurunkan Perilaku Risiko Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.385.000	-	0,00%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Menurunkan Perilaku Risiko Kesehatan Kabupaten/Kota	56.385.000	-	0,00%
				Kategori Kota Layak Anak	Level Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	-	-	-	Nindya	-	-	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHIA)	114.047.700	86.752.650	38,23%
														Pembinaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/ Kota	50.149.500	29.303.000	45,72%
														Aktivasi Jejaring dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	7.409.900	3.762.000	50,17%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	52.680.000	25.540.500	48,51%
														Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	114.437.800	37.449.000	32,72%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	30.205.000	15.935.000	52,76%
														Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	17.000.000	-	0,00%
														Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	61.237.800	21.514.050	35,00%
														URUSAN PEMERINTAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
														PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.200.000	400.000	12,50%
														Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksananya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000	400.000	12,50%
														Facilitasi Buluhai Ekstremisisme Masyarakat	3.200.000	400.000	12,50%



Catatan :



TRIWULAN III



PENGUKURAN KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROSOLINGGO
TAHUN 2022

TRIMULAN II
Tahun Anggaran 2022

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategic	Indikator Kinerja Utama PD	Formula Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Geser Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Page	Realisasi Anggaran Triwulan II	CAPAIAN (%)
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Presentase Penduduk Miskin	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhannya	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhannya X 100 % Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi target di Tahun N	88	%	0%	0%	0%	88%	88%	87%	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
														URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL	5.251.604.899	5.511.704.741	88,88%
														PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.174.015.848	4.379.298.898	78,82%
														Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.887.999	25.485.488	39,81%
														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	3.424.000	22,83%
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	52.887.999	23.061.488	43,62%
														Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.134.885.896	3.675.864.834	71,61%
														Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.908.084.906	3.607.551.654	72,76%
														Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	124.415.900	40.470.000	32,53%
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	52.152.000	27.042.389	51,84%
														Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.120.000	-	0,00%
														Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.120.000	-	0,00%
														Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	187.891.899	143.824.701	72,87%
														Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Alas Kaki/Kelengkapan	35.100.000	34.937.320	99,54%
														Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	152.401.000	108.887.381	71,44%
														Administrasi Urusan Perangkat Daerah	265.848.788	183.885.565	69,19%
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.141.748	25.674.700	94,62%
														Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.849.720	4.380.500	63,81%
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.356.300	4.895.000	66,54%
														Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan	1.968.000	1.900.000	96,54%
														Facilitas Kunjungan Tamu	3.300.000	2.346.000	71,10%
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.365.000	111.637.803	64,60%
														Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48.000.000	31.789.762	66,23%
														Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.748.999	60.183.580	84,98%
														Pengadaan Mebel	13.427.500	13.403.590	99,82%
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.319.999	46.779.990	81,47%
														Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.861.569	86.501.911	48,78%
														Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.749.500	896.500	13,28%
														Penyediaan Jasa Konsultasi, Gambar Daya-Ar dan Lainnya	106.026.000	67.345.411	63,51%
														Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	37.137.500	4.200.000	11,31%
														Penyediaan Jasa Pelayanan Urus Kairo	25.074.500	14.000.000	55,83%
														Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.863.773	203.541.785	79,58%
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.357.600	15.954.830	65,54%
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.955.175	88.108.406	75,34%
														Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	32.568.000	72,37%
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.751.000	66.902.509	97,31%
														PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	92.798.969	82.047.483	88,31%

MO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama PD	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Sasaran Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Page	Realisasi Anggaran Triwulan II	CAPAIAN (%)
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Pengembangan Pokok Sumbat Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Kota	92.796.900	92.047.480	66,86%
														Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten Kota	90.807.000	61.747.480	67,99%
														Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1.939.900	360.000	15,46%
														PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.027.599.900	604.694.632	58,85%
														Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Tertentu, Lanjut Usia Tertentu, serta Cendekian Pengemis di Luar Panti Sosial	608.263.000	365.976.580	60,15%
														Penyediaan Pemukiman	794.088.000	515.378.580	64,90%
														Penyediaan Alat Bantu	142.175.000	50.600.000	35,59%
														Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napsa di Luar Panti Sosial	91.296.900	38.715.482	42,41%
														Penyediaan Pemukiman	9.173.000	2.000.000	21,80%
														Penyediaan Sandang	82.121.900	36.715.482	44,71%
														PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	723.885.700	358.676.780	49,56%
														Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	723.885.700	358.676.780	49,55%
														Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	409.413.900	180.126.343	39,11%
														Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	189.347.600	101.248.880	53,47%
														Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	125.044.300	97.254.570	77,81%
														PROGRAM PENANAMAN BENCANA	136.889.790	91.290.000	66,19%
														Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat terhadap Rastapalagan Bencana Kabupaten Kota	136.889.790	91.290.000	66,18%
														Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanza Siaga Bencana	136.889.790	91.290.000	66,15%
														PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	181.626.860	95.795.480	54,99%
														Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	181.626.860	95.795.480	54,99%
														Rehabilitasi Taman Dan Prasana Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	10.750.000	16.750.000	100,00%
														Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	17.499.600	7.477.000	42,73%
														Pengamanan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	73.377.200	37.568.480	51,20%
2	Wiringkat Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Wiringkatnya Kebijakan dan Kesetaraan Gender	Nilai Evaluasi Pengerustamaan Gender	Nilai Evaluasi Pengerustamaan Gender	Utama	Utama	-	-	-	Utama	-	-	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
														URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
														PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	296.340.900	184.755.164	62,35%
														Pembinaan Penganutnataan Gender (PUG) pada Lembaga Pemantab Kesejahteraan Kabupaten Kota	58.706.000	48.512.880	82,62%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kesejahteraan Kabupaten Kota	40.320.000	23.024.900	57,11%
														Advokasi Kebijakan dan Peningkatan Pelaksanaan PUG termasuk PRG	18.380.000	17.488.000	95,15%
														Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kesejahteraan Kesejahteraan Kabupaten Kota	221.843.900	144.242.364	64,97%
														Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	58.954.000	48.727.864	82,65%
														Advokasi Kebijakan dan Peningkatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	172.889.900	95.515.500	55,31%
														PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	3.906.000	2.906.000	74,40%

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama PD	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun	Sesuai Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Page	Realisasi Anggaran Triwulan II	CAPAIAN (%)
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Pengumpulan, Pengolahan/Analisa dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kerangka Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000	2.500.000	71,43%
														Penyediaan Data Gender dan Anak di Kecamatan Kabupaten/Kota	2.500.000	2.500.000	100,00%
														Penyajian dan Penyerahan Data Gender dan Anak dalam Kerangka Data di Kecamatan Kabupaten/Kota	1.000.000	-	0,00%
			Meningkatkan Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Pemertasaan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang selesai ditangani X 100 % Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada P2TP2A	100	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	252.084.889	18.225.000	7,81%
														Pencapaian Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	85.725.000	-	0,00%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	51.500.000	-	0,00%
														Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kecamatan Kabupaten Kota	4.225.000	-	0,00%
														Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kecamatan Kabupaten/Kota	136.086.000	19.225.000	13,77%
														Penyediaan Layanan Pergaulan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kecamatan Kabupaten/Kota	24.000.000	16.000.000	66,67%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kecamatan Kabupaten/Kota	115.990.000	3.225.000	2,79%
														Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.289.800	-	0,00%
														Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perencanaan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kecamatan Kabupaten/Kota	40.819.800	-	0,00%
														Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kecamatan Kabupaten/Kota	16.650.000	-	0,00%
														PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	324.215.800	18.575.000	5,72%
														Pencapaian Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	82.125.000	12.075.000	13,11%
														Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kecamatan Kabupaten/Kota	30.075.000	12.075.000	39,38%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kecamatan Kabupaten/Kota	61.450.000	-	0,00%
														Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	173.704.000	6.500.000	3,79%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kecamatan Kabupaten/Kota	164.529.000	6.500.000	3,99%
														Pengembangan Kemitraan, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan perlindungan Khusus Kecamatan Kabupaten/Kota	6.500.000	-	0,00%
														Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kecamatan Daerah Kab/Kota	4.225.000	-	0,00%
														Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Kota	98.388.000	-	0,00%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kecamatan Kabupaten/Kota	95.390.000	-	0,00%
				Kategori Kota Layak Anak	Level Kota Layak Anak	Midyas	Midyas	-	-	-	Midyas	-	-	PROGRAM PEMERLUAN HAK ANAK (PHA)	174.587.700	83.812.189	47,89%

MO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama PO	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Sesuai Indikator kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Page	Realisasi Anggaran Triwulan III	CAPAIAN (%)
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18
														Pembinaan PMA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	60.148.900	18.827.900	31,12%
														Aktivasi Kegiatan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	7.408.500	7.387.400	98,50%
														Koordinasi dan Sinergisasi Pembinaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	52.850.000	12.540.500	23,82%
														Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	114.437.880	83.884.280	73,68%
														Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	30.200.000	22.052.000	73,33%
														Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	17.300.000	-	0,00%
														Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	67.237.880	40.632.280	60,43%
	Wideningkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Wideningnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat											URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.200.000	1.832.000	57,25%
														Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000	1.832.000	57,25%
														Fasilitas Buluh (B) Gering Rhyang Masyarakat	3.200.000	1.832.000	57,25%
														TOTAL JUMLAH	5.306.036.139,00	3.022.284.085,00	57,16%

Probolinggo, 11 Oktober 2022
 KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBLINGGO

 NIKY RUMAYITTO, S.Sos., M.Si.
 Kepala Utama Muda
 NIP. 19670711 198809 1 001



TRIWULAN IV



PENGUKURAN KINERJA
DIKAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2022

TRIMULAN IV
Tahun Anggaran 2022

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama PO	Formula Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Page	Realisasi Anggaran Triwulan IV	CAPAIAN (%)
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) yang Terpenuhi Kebutuhannya	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) yang menjadi target di Tahun N X 100 %	88	%	8%	9%	0%	88%	80,96%	82%	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
														URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL	8.861.658.449	8.071.418.807	91,08%
														PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	8.221.223.599	5.917.643.912	72,12%
														Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.992.000	96.218.983	99,34%
														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.375.000	9.224.000	98,29%
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.217.000	46.994.983	99,53%
														Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.118.943.866	4.698.012.164	91,80%
														Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.977.991.716	4.724.200.484	94,90%
														Peleaksanaan Perakutamaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91.332.000	94.204.000	92,30%
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan/Unit/Instansi/Sesatuan SKPD	41.620.150	41.605.620	99,97%
														Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.560.000	5.560.000	100,00%
														Peleaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.560.000	5.560.000	100,00%
														Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	197.772.320	195.896.618	98,98%
														Pengadaan Pakuan Dinas Berupa Atribut Kelengkapannya	36.100.000	34.937.320	96,78%
														Penelitian dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	182.672.320	180.959.298	99,09%
														Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.726.998	358.016.982	99,52%
														Penyediaan Penelitian dan Perengkapan Kantor	28.170.880	28.048.700	99,57%
														Penyediaan Penelitian Rumah Tangga	5.527.000	5.526.500	99,99%
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggajian	7.395.300	7.379.000	99,78%
														Penyediaan Bahan Baku dan Perakutan Perundang-undangan	3.076.000	3.046.000	99,02%
														Facilitas Kuryang Tani	4.500.000	4.482.000	99,60%
														Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.355.618	265.678.303	99,45%
														Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	42.000.000	41.951.489	99,88%
														Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.727.500	66.703.586	99,98%
														Pengadaan Mebel	13.427.500	13.403.500	99,82%
														Pengadaan Perakutan dan Mesin Lainnya	53.300.000	53.300.000	100,00%
														Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.872.188	125.841.896	77,29%
														Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	1.136.500	99,63%
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.509.700	98.115.399	89,77%
														Penyediaan Jasa Perakutan dan Perengkapan Kantor	27.137.500	10.026.000	36,94%
														Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.074.900	18.573.000	74,08%
														Peleaksanaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.029.175	261.384.448	99,38%
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.346.000	26.882.789	98,31%
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Petrus Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.732.175	119.671.146	99,12%
														Pemeliharaan Perakutan dan Mesin Lainnya	48.000.000	47.940.000	99,88%
														Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.951.000	66.900.909	66,93%
														PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	92.796.900	90.497.229	97,52%

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama PD	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja I tahun	Sasaran Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Page	Realisasi Anggaran Triwulan IV	CAPAIAN (%)
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Pengembangan Polarisasi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	92.796.900	90.497.220	97,52%
														Peningkatan Kemampuan Polarisasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	95.857.000	88.623.720	97,54%
														Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (KKK)	1.528.500	1.673.500	98,56%
														PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.066.043.500	958.816.121	89,99%
														Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Tertentu, Lanjut Usia Tertentu, serta Delapanbelas Pengemis di Luar Pantol Sosial	898.963.000	800.382.320	89,07%
														Penyediaan Pemakanan	794.088.000	749.857.320	94,30%
														Penyediaan Alat Bantu	65.875.000	50.625.000	77,15%
														Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napos di Luar Pantol Sosial	269.086.500	158.627.801	75,77%
														Penyediaan Pemakanan	9.175.000	7.580.000	82,62%
														Penyediaan Sandang	199.925.500	150.847.801	75,46%
														PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.253.991.500	883.642.834	71,61%
														Pengalihan Data Fakir Miskin Keluar Daerah Kabupaten/Kota	1.233.991.500	883.642.834	71,61%
														Pengalihan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	408.413.900	370.462.394	90,69%
														Facilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	538.348.000	354.242.520	65,82%
														Facilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	186.228.000	148.937.810	80,00%
														PROGRAM PENANGANAN BENCANA	142.976.190	120.534.309	84,30%
														Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	142.976.190	120.534.309	84,30%
														Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siswa Bencana	142.976.190	120.534.309	84,30%
														PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	101.628.800	100.291.828	98,69%
														Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	101.628.800	100.291.828	98,69%
														Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10.750.000	10.750.000	100,00%
														Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.014.500	14.000.000	99,90%
														Pengamanan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	76.862.200	75.541.828	98,29%
2	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Perempuan Miskin	Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Nilai Evaluasi Pengarusutamaan Gender	Nilai Evaluasi Pengarusutamaan Gender	Utama	Utama	-	-	-	Utama	-	-	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
														URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
														PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	490.827.480	442.115.284	98,24%
														Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	56.700.800	56.257.800	99,21%
														Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	40.320.000	38.769.800	96,16%
														Alokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG berbasis PPRG	18.380.000	17.488.000	95,15%
														Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	391.327.480	385.837.484	98,60%
														Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	158.954.000	158.028.184	99,42%
														Alokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	232.373.480	227.809.300	98,04%
														PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	3.506.000	2.500.000	71,43%

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama PD	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Page	Realisasi Anggaran Triwulan IV	CAPAIAN (%)
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Pengumpulan, Pengolahan Analisa dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Keberagaman Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000	2.500.000	71,43%
														Penyebaran Data Gender dan Anak di Kecamatan Kabupaten/Kota	2.500.000	2.500.000	100,00%
														Penyajian dan Penelusuran Data Gender dan Anak dalam Keberagaman Data di Kecamatan Kabupaten/Kota	1.000.000	-	0,00%
			Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang selesai ditangani ----- x 100 % Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada P2T/P2A	100	%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	272.614.800	148.158.600	54,35%
														Preveksi Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	58.725.000	45.279.000	81,25%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	51.500.000	41.056.000	80,91%
														Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kecamatan Kabupaten Kota	4.225.000	3.581.000	84,78%
														Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kecamatan Kabupaten/Kota	186.040.000	75.227.600	41,78%
														Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kecamatan Kabupaten/Kota	54.450.000	57.250.000	86,00%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kecamatan Kabupaten/Kota	115.590.000	17.977.600	15,55%
														Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.849.800	27.850.000	75,33%
														Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peranganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kecamatan Kabupaten/Kota	20.190.300	11.550.000	57,18%
														Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kecamatan Kabupaten/Kota	16.050.000	16.100.000	96,70%
														PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	344.835.000	132.944.500	38,58%
														Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan peran Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	82.125.000	75.475.000	81,90%
														Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kecamatan Kabupaten/Kota	30.675.000	22.875.000	73,59%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kecamatan Kabupaten/Kota	81.450.000	52.900.000	66,06%
														Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	175.734.000	15.189.500	8,63%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kecamatan Kabupaten/Kota	164.525.000	15.190.500	9,22%
														Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan perlindungan Khusus Kecamatan Kabupaten/Kota	8.500.000	-	0,00%
														Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kecamatan Daerah Kabupaten Kota	4.225.000	-	0,00%
														Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Kota	78.888.000	42.308.000	55,07%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kecamatan Kabupaten/Kota	75.805.000	42.300.000	55,07%
			Kategori Kota Layak Anak	Level Kota Layak Anak		Windy	Windy	-	-	-	Windy	Utama	-	PROGRAM PERENCANAAN ANAK (PRA)	344.937.700	182.469.400	78,98%
														Perencanaan PRA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kecamatan kabupaten kota	83.149.900	89.877.900	99,71%

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama PD	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	Target Kinerja 1 tahun	Satuan Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja	CAPAIAN Kinerja (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Anggaran Triwulan IV	CAPAIAN (%)
								Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														Advisasi Kebijakan dan Pendampingan Penemuan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kemungkinan Kabupaten/Kota	7.489.900	7.367.400	98,50%
														Fasilitasi dan Strukturasi Pelaksanaan Penemuan Hak Anak Kemungkinan Kabupaten/Kota	52.800.000	52.590.500	99,60%
														Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kemungkinan Kabupaten / Kota	184.787.800	152.481.520	71,70%
														Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	100.550.000	60.988.000	60,65%
														Pengembangan Kompetensi, Informasi, dan Edukasi Pemroses Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	17.000.000	13.980.000	82,24%
														Pengujian Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	67.237.800	57.523.520	85,55%
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Penduduk Biddin	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat											URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.200.000	3.172.000	99,13%
														Pemberdayaan Lembaga Komunitas yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000	3.172.000	99,13%
														Fasilitasi Rutan Bni Cikong Roving Masyarakat	3.200.000	3.172.000	99,13%
														TOTAL JUMLAH	18.188.573.348,00	8.892.776.611,00	48,90%



Catatan:

4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **REY SUWIGTYO, S.Sos. M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kota Probolinggo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP**
Jabatan : Wali Kota Probolinggo
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, November 2022
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670711 198809 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	88 %
2	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Nilai Evaluasi Pengarusutamaan Gender	Utama
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	- Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani - Kategori Kota Layak Anak	100 % Nindya

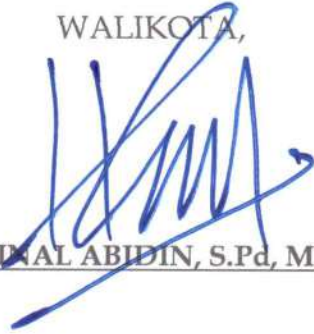
Program (5)	Anggaran (Rp) (6)	Keterangan (7)
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.221.223.559,-	DAU
- Program Pemberdayaan Sosial	92.796.900,-	DAU
- Rehabilitas Sosial	1.069.043.500,-	DAU
- Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.233.991.500,-	DAU/DBH-CHT
- Penanganan Bencana	142.976.190,-	DAU
- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	101.626.800,-	DAU
- Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	450.027.400,-	DAU/DID
- Perlindungan Perempuan	272.614.800,-	DAU/DAK
- Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	3.500.000,-	DAU
- Pemenuhan Hak Anak (PHA)	244.937.700,-	DAU

- Perlindungan Khusus Hak Anak	344.635.000,-	DAU/DAK
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.200.000,-	DAU

Jumlah

Rp. 10.180.573.349 ,-

WALIKOTA,



HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

Probolinggo, November 2022
KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA
KOTA PROBOLINGGO



REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

5. Data Pendukung Capaian Kinerja Perangkat Daerah



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Raya Dringu No. 13 ■ (0335) 421431 Fax. (0335) 421431

e-mail: dinsos.probolinggokota@gmail.com

PROBOLINGGO

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kota Probolinggo

Dari : Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tanggal : 16 Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Laporan terkait Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada
Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun
2022**

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 dan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya, maka kami perlu untuk melaporkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan rencana strategis 'meningkatnya kualitas dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS' pada Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 'Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhannya'. Dalam menghitung pencapaian indikator tersebut, berikut kami rinci data pendukung sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pemberian Bantuan Sembako bagi Anak Yatim dengan target 26 Anak terealisasi sebanyak 26 Anak;
- b. Kegiatan Pemberian Bantuan Sembako bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan target 9 Orang terealisasi 9 Orang;

- c. Kegiatan Pemberian Bantuan Sembako bagi Disabilitas Mental dengan target 26 Orang terealisasi 26 Orang;
- d. Kegiatan Pemberian Bantuan Alat Usaha bagi Fakir Miskin dengan target 27 Orang terealisasi 27 Orang;
- e. Kegiatan Pemberian Bantuan Sembako bagi Kelompok Rentan dengan target 283 Orang terealisasi 118 Orang;
- f. Kegiatan Pemberian Bantuan Dipan dan Kasur bagi Lanjut Usia Terlantar dengan target 2 Orang terealisasi 0 Orang;
- g. Kegiatan Pemberian Bantuan Kursi Roda bagi Lanjut Usia dengan target 26 Orang terealisasi 15 Orang;
- h. Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dengan target 8.083 Orang terealisasi 7.455 Orang;

Berdasarkan data pendukung diatas dapat diperoleh hasil pencapaian Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhannya sebesar **80,90 %** dari target tahun 2022 sebesar 88 % dengan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 7650 Orang dibagi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi target di Tahun N sebesar 9.456 Orang dan dikalikan 100 Persen.

Demikian Laporan terkait Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya. Sebagai bahan evaluasi kami mohon kiranya bapak dapat memberikan petunjuk dan arahan lebih lanjut.

KEPALA BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL



PRAMITO LEGOWO, S.Sos.

NIP 19660114 198602 1 001



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Raya Dringu No.13 ☎ (0335) 421431 Fax.(0335) 421431

PROBOLINGGO - 67271

e-mail : dinsos.probolinggokota@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Probolinggo
Dari : Plt.Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
Tanggal : 16 Januari 2023
Sifat : Penting
Perihal : Laporan terkait Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Bidang
Pemberdayaan Perempuan Tahun 2022

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 dan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya, maka kami perlu untuk melaporkan pencapaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan strategis meningkatnya Peran serta Perempuan dalam Pembangunan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Evaluasi Pengarusutamaan Gender. Evaluasi Pengarusutamaan Gender dilaksanakan berdasarkan 7 Prasyarat yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Prasyarat ini dalam alur kerja pengarusutamaan gender sekaligus menjadi kerangka input yang harus dibangun dalam implementasi PUG, sesuai dengan hal diatas dapat diterangkan pelaksanaan Evaluasi PUG Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat dari Kementerian PPPA Deputy Kesetaraan Gender tanggal 31 Oktober 2022 Nomor B-478/D.KG.2/KG.02.06/10/2022 Perihal Pemberitahuan tentang Evaluasi Penyelenggaraan PUG di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ***bahwa dalam rangka pengembangan indikator Evaluasi penyelenggaraan PUG, maka penyelenggaraan APE tahun 2022 ditiadakan.*** Namun untuk memperoleh data-data tentang penyelenggaraan PUG Tahun 2021 -2022 maka tetap dilaksanakan evaluasi mandiri
- b. Berdasarkan Surat dari DP3AK Provinsi Jatim tanggal 14 November 2022 Nomor 474.24/86/10.2/2022 perihal Evaluasi Mandiri PUG Kabupaten/Kota dan Desa Provinsi Jawa Timur ***bahwa Provinsi Jawa Timur melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG).***
- c. Berdasarkan surat dari DP3AK Provinsi Jatim tanggal 27 Desember 2022 Nomor 474.24/1858/109.2/2022 Perihal Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) ***bahwa Kota Probolinggo mendapatkan Penghargaan Kabupaten/Kota dengan Komitmen Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Terbaik Tahun 2022.***

Demikian laporan terkait Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Sebagai bahan evaluasi kami mohon kiranya Bapak dapat memberikan petunjuk dan arahan lebih lanjut.

Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

RATIH OKTAVIANA W, SH
NIP. 19841025 201001 2 023



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Raya Dringu No. 13 Telp. (0335) 421431 Fax. (0335) 421431
PROBOLINGGO 67271
Email : dinsosp3a@probolinggokota.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dari : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak
Nomor : 460/ - /425.109/2023
Tanggal : 16 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan terkait pencapaian indikator kinerja utama pada bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak tahun 2022

Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 dan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta pada tahun anggaran selanjutnya, maka kami perlu melaporkan pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan rencana strategis meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak pada bidang perlindungan perempuan dan pengarusutamaan hak anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Pencapaian indikator kinerja utama persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani. Pada tahun 2022, kasus kekerasan mengalami penurunan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Aplikasi Simphoni, kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 20 kasus yang terminasi dari jumlah dimaksud kasus perempuan masih sisa 1 kasus (95%), dan kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 23 kasus yang terminasi dari jumlah dimaksud kasus anak masih sisa 3 kasus (87%).
2. Pencapaian indikator kinerja utama dalam pemenuhan hak anak. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Probolinggo meraih penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori "Utama" berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan tersebut langsung diterima oleh Ibu Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, telah kami lampirkan data pendukung capaian indikator kinerja utama tersebut sebagaimana pada lampiran nota dinas ini.

Demikian laporan terkait pencapaian indikator kinerja utama pada bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Sebagai bahan evaluasi kami mohon kiranya bapak dapat memberikan petunjuk dan arahan lebih lanjut.

**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN PENGARUSTAMAAN HAK ANAK**



LUCIA ARIES YULIYANTI, S.STP. MM

Pembina

NIP. 19780408 199711 2 001



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

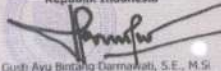
Nomor : 759/MEN/TK.05/7/2022

Dengan ini memberikan penghargaan kepada:

Pemerintah Kota Probolinggo
Sebagai Kota Layak Anak Peringkat Utama Tahun 2022

Jakarta, 23 Juli 2022

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia



I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si